

LAMPIRAN**Lampiran 1. Instrumen Penelitian Penilaian Ketangguhan Bencana
INFORMED CONSENT****UNTUK PENGUMPULAN DATA KUALITATIF**

Bapak/Ibu yang saya hormati, saya a.n Lexi Jalu Aji mahasiswa dari Universitas Pertahanan RI ingin melakukan wawancara mendalam dengan Bapak/Ibu. Wawancara ini dilakukan sehubungan dengan penelitian tesis saya tentang:

**Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa
Glagaharjo Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah Kabupaten Sleman**

Hasil wawancara yang Bapak/Ibu sampaikan akan dirahasiakan dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyusunan tesis dan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/Ibu.

Apabila Bapak/Ibu bersedia untuk saya wawancarai, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih

Sleman, 2021

(Lexi Jalu Aji)

PEDOMAN WAWANCARA
PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS DESA TANGGUH BENCANA
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Komponen 1 Kualitas dan Akses Layanan Dasar

Indikator 1: Tersedianya Fasilitas Pendidikan Formal dan/atau Non-formal Dengan Kualitas Yang Baik Dan Mudah Dicapai Oleh Masyarakat

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1.1	Apakah di desa terdapat fasilitas Pendidikan formal dan/atau non-formal ?	V	
1.2	Apakah fasilitas-fasilitas tersebut mudah dicapai oleh masyarakat?	V	
1.3	Apakah fasilitas-fasilitas tersebut mempunyai kualitas yang baik ?	V	
2	Apakah di desa terdapat program peningkatan jumlah/fungsi fasilitas pendidikan formal dan/atau non formal untuk membangun ketangguhan terhadap bencana?	V	
3	Apakah desa terlibat dalam melakukan evaluasi program peningkatan fasilitas pendidikan formal dan/atau non-formal ?	V	
4	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas layanan fasilitas pendidikan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?	v	

Indikator 2: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kualitas Yang Baik Dan Mudah Dicapai Oleh Masyarakat

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
5	Apakah di desa terdapat fasilitas layanan Kesehatan yang mudah dicapai oleh masyarakat?	v	
6	Apakah di desa terdapat program peningkatan	v	

	kualitas layanan kesehatan guna membangun ketangguhan?		
7	Apakah desa ikut terlibat dalam melakukan evaluasi program peningkatan kualitas layanan kesehatan tersebut?	v	
8	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		v

Indikator 3: Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi Yang Mudah Dijangkau Masyarakat

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
9	Apakah di desa terdapat sarana prasarana transportasi yang mudah dijangkau masyarakat?	v	
10	Apakah di desa terdapat program penguatan kapasitas sarana prasarana transportasi tersebut guna membangun ketangguhan?	v	
11	Apakah desa ikut serta dalam melakukan evaluasi program kapasitas sarana prasarana transportasi tersebut?	v	
12	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana transportasi bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		v

Indikator 4: Tersedianya Pelayanan Publik Yang Baik

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
13	Apakah di desa terdapat sarana publik?	v	
14	Apakah di desa terdapat program penguatan sarana publik tersebut guna membangun ketangguhan?	v	
15	Apakah desa ikut serta dalam melakukan evaluasi	v	

	program penguatan sarana publik tersebut?		
16	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sarana publik bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		v

Indikator 5: Tersedianya Sistem Informasi Yang Dapat Menjangkau Seluruh Masyarakat Desa/ Kelurahan Secara Cepat

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
17	Apakah tersedia sistem informasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat desa/kelurahan secara cepat ?	v	
18	Apakah desa membuat program peningkatan sistem informasi untuk meningkatkan ketangguhan bencana?	v	
19	Apakah desa melakukan evaluasi program peningkatan sistem informasi tersebut?	v	
20	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sistem informasi untuk lebih meningkatkan ketangguhan masyarakat dan desa sekitar bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		v

Indikator 6: Adanya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Yang Mandiri Dan Sumber daya Manusia Yang Berkualitas

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
21	Apakah desa / kelurahan melakukan tata kelola pemerintahan sesuai aturan perundangan yang berlaku?	v	
22	Apakah desa / kelurahan mempunyai program untuk peningkatan tata kelola pemerintahan menuju tata kelola yang mandiri dengan sumber daya manusia yang	v	

	berkualitas?		
23	Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi program penguatan tata kelola pemerintahan desa sesuai perundang-undangan yang berlaku?	v	
24	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		v

Indikator 7: Adanya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
25	Apakah desa / kelurahan melakukan program / kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ?	v	
26	Apakah desa / kelurahan melakukan peningkatan kegiatan / anggaran untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam?	v	
27	Apakah ada evaluasi program / kegiatan untuk lebih baik dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan?	v	
28	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?	v	

Indikator 8: Adanya Penguatan Perlindungan & Dukungan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Budaya Dan Spiritual Masyarakat

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak

29	Apakah desa / kelurahan melakukan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat ?	v	
30	Apakah desa / kelurahan melakukan peningkatan Jumlah kegiatan / anggaran / program perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat?	v	
31	Apakah desa / kelurahan melakukan evaluasi dan perbaikan program / kegiatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat?	v	
32	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam kegiatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual desa / masyarakat sekitar bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?	v	

Indikator 9: Adanya Perlindungan Keamanan Masyarakat

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
33	Apakah desa / kelurahan memiliki mekanisme perlindungan keamanan masyarakat ?	v	
34	Apakah desa / kelurahan melakukan program peningkatan kapasitas perlindungan keamanan masyarakat yang bekerjasama dengan Babinsa dan/atau Babinkamtibmas setempat?	v	
35	Apakah desa / kelurahan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme perlindungan keamanan masyarakat?	v	
36	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam kegiatan perlindungan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?	v	

Komponen 2 Dasar Sistem Penanggulangan Bencana

Indikator 10: Adanya Kebijakan Pendukung Dalam Upaya Pengelolaan Risiko Bencana Di Desa/Kelurahan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
37	Apakah desa memiliki kebijakan dalam upaya pengelolaan risiko bencana ditingkat desa/kelurahan?	v	
38	Apakah kebijakan tersebut didukung oleh peningkatan aktifitas atau alokasi anggaran pengelolaan risiko bencana di desa atau kelurahan?	v	
39	Apakah aktifitas-aktifitas pengelolaan risiko bencana tersebut menurunkan risiko bencana di desa atau kelurahan?	v	
40	Apakah kebijakan pengelolaan risiko bencana telah mampu mendorong untuk dicontoh dan diterapkan oleh desa/kelurahan sekitarnya?		v

Indikator 11: Tersedianya Regulasi Desa/Kelurahan Untuk Pengelolaan Risiko Bencana Dalam Suatu Kawasan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
41	Apakah ada kesepakatan bersama (misal: MoU, Nota Kesepahaman, dll) dengan desa/kelurahan tetangga tentang pengelolaan risiko bencana antar desa?	v	
42	Apakah kesepakatan bersama tersebut meningkatkan efektivitas kegiatan atau alokasi anggaran dalam pengelolaan kawasan risiko bencana antar desa?	v	
43	Apakah kesepakatan bersama tersebut berhasil menurunkan risiko di kawasan risiko bencana antar desa?	v	
44	Apakah bentuk kesepakatan bersama tersebut telah		v

	dicontoh dan diterapkan oleh kawasan lain?		
--	--	--	--

Indikator 12: Terlaksananya Pengkajian Risiko Bencana Dan Potensi Dampak Perubahan Iklim Desa/Kelurahan Secara Berkala Dan Berkelanjutan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
45	Apakah desa telah mengetahui lokasi-lokasi yang berisiko tinggi terkena bencana dan/atau dampak perubahan iklim di wilayahnya?	v	
46	Apakah desa/kelurahan telah menyusun kajian risiko bencana maupun potensi dampak perubahan iklim ?	v	
47.1	Apakah kajian risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa?	v	
47.2	Apakah dokumen kajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim dievaluasi secara berkala oleh komponen desa atau kelurahan?	v	
48	Apakah kajian risiko bencana dan dampak potensi perubahan iklim tersebut direplikasi ketingkat kawasan?		v

Indikator 13: Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan Yang Menjadi Bagian Perencanaan Pembangunan Pada Pemerintahan Vertikal

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
49	Apakah desa/kelurahan memiliki Rencana Penanggulangan Bencana desa/ kelurahan?	v	
50	Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RPJMDes?	v	
51	Apakah RPJMDes dan RPB tersebut telah meningkatkan kegiatan atau alokasi anggaran pengurangan risiko	v	

	bencana di desa?		
52	Apakah RPJMDes telah mampu mempengaruhi program/kegiatan pada Rencana Strategis Kecamatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian/Lembaga Negara sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah?	v	

Indikator 14: Adanya Dukungan Lembaga Luar Untuk Pengelolaan Risiko Bencana Sesuai Dengan Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan Atau Rencana Strategis Kelurahan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
53	Apakah ada dukungan lembaga dari luar desa (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan) untuk upaya pengurangan risiko bencana?	v	
54	Apakah dukungan lembaga dari luar desa tersebut sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMDes/ Renstra Kelurahan?	v	
55	Apakah dukungan lembaga dari luar desa tersebut meningkatkan jumlah dan anggaran kegiatan pengurangan risiko bencana di desa?	v	
56	Apakah dukungan dari luar desa mampu menurunkan risiko bencana di wilayah tersebut?	v	

Indikator 15: Adanya Penyelarasan Rencana Penanggulangan Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim Antar Desa/Kelurahan Dalam Suatu Kawasan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
57	Apakah RPB desa/kelurahandiselaraskan dengan RPB	v	

	desa/kelurahan tetangga?		
58	Apakah desa/kelurahan memiliki kesepakatan bersama dengan desa tetangga untuk menjalankan RPB yang ada?	v	
59	Apakah RPB dan kesepakatan tersebut dievaluasi bersama dengan desa tetangga setiap tahun?		v
60	Apakah rencana pengelolaan risiko bencana tingkat kawasan dicontoh dan diterapkan oleh desa/kelurahan di kawasan lain?		v

Indikator 16. Optimalitas Peran Serta Forum Pengelolaan Risiko Bencana Desa Atau Kelurahan Dalam Mewujudkan Rencana Pembangunan Desa Atau Rencana Strategis Kecamatan Untuk Kelurahan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
61	Apakah desa/kelurahan sudah ada forum pengelolaan risiko bencana ?	v	
62	Apakah program kerja forum pengelolaan risiko bencana diperkuat dengan kebijakan desa ?	v	
63	Apakah pelaksanaan program kerja dilakukan evaluasi setiap tahun ?	v	
64	Apakah forum tersebut mampu mengelola sumber daya untuk operasional dan kegiatan forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan ?	v	

Komponen 3 Pengelolaan Risiko Bencana

Indikator 17. Adanya Aksi Terpadu Pengelolaan Risiko Bencana Antara Desa/Kelurahan Dalam Suatu Kawasan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
65	Apakah telah diketahui penyebab utama kerugian	v	

	dari bencana erupsi Gunung Merapi yang ada di suatu desa/kelurahan?		
66	Apakah telah dilakukan aksi-aksi untuk mengatasi penyebab kerugian tersebut?	v	
67	Apakah dalam pelaksanaan aksi-aksi tersebut melibatkan partisipasi desa-desa di sekitar anda?	v	
68	Apakah aksi-aksi tersebut mampu menurunkan risiko bencana ?	v	

Indikator 18. Peningkatan Wawasan Dan Keterampilan Untuk Mengelola Risiko Bencana Melalui Edukasi, Sosialisasi Dan Literasi Kebencanaan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
69	Apakah sudah ada pelatihan terkait hasil penelitian (riset terapan) untuk kebencanaan dan perubahan iklim yang sesuai dengan karakter dan potensi desa?	v	
70	Apakah pelatihan tersebut memberi peningkatan pengetahuan dan keterampilan baru untuk mengantisipasi bencana ?	v	
71	Apakah keterampilan yang diperoleh dapat/telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ?	v	
72	Apakah wawasan dan keterampilan tersebut telah membudaya pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan masyarakat desa ?	v	

Komponen 4 Kesiapsiagaan Darurat

Indikator 19. Tersedianya Mekanisme Untuk Mendeteksi Dini Kemungkinan Terjadinya Bencana Pada Skala Desa/Kelurahan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak

73	Apakah ada kelompok atau individu khusus yang dipercaya oleh masyarakat desa/kelurahan untuk mendeteksi kemungkinan ancaman bencana?	v	
74	Apakah kelompok atau individu tersebut dalam menjalankan tugasnya dilegalkan oleh pemerintah desa/kelurahan?	v	
75	Apakah masyarakat desa/kelurahan mengetahui cara menghubungi kelompok atau individu tersebut?	v	
76	Apakah kelompok/individu tersebut dapat dihubungi setiap saat (24/7) untuk diminta informasi terkait kemungkinan bencana?	v	

Indikator 20. Tersedianya Mekanisme Penerima Peringatan Dini Dan/Atau Perintah Evakuasi

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
77	Apakah masyarakat dapat menerima peringatan dini ancaman bencana yang diberikan oleh pemerintah pusat?	v	
78	Apakah masyarakat dapat menerima peringatan tersebut melalui lebih dari 2 peralatan komunikasi yang berbeda?	v	
79	Apakah masyarakat dapat menerima informasi perintah	v	
80	Apakah masyarakat dapat menerima informasi perintah evakuasi tersebut	v	

Indikator 21. Berfungsinya Mekanisme Penyebaran Arahan Evakuasi Yang Mudah Diakses Dan Dipahami Semua Pihak Termasuk Kelompok Rentan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
81	Apakah ada mekanisme penyebaran	v	

	informasi/arahan untuk mengungsi sebelum bencana terjadi yang dilakukan khusus oleh pemerintah desa?		
82	Apakah Peringatan ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat desa/kelurahan?	v	
83	Apakah peringatan/perintah ini dapat men-jangkau masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan (usia lanjut, tuli dsb)?	v	
84	Apakah masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menerima peringatan/arahan ini?	v	

Indikator 22. Tersedianya Peta Rencana Evakuasi Masyarakat Yang Dapat Digunakan Sebelum Dan Pada Saat Bencana Terjadi

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
85	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia peta rencana evakuasi untuk masyarakat ?	v	
86	Apakah peta rencana evakuasi dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendukung simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi di desa/kelurahan?		v
87	Adakah peta rencana evakuasi ini didukung oleh kebijakan di tingkat desa/kelurahan ?	v	
88	Apakah peta rencana evakuasi yang tersedia menjadi referensi bagi desa/kelurahan tetangga ?		v

Indikator 23. Tempat Evakuasi

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
89	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia tempat	v	

	evakuasi sementara dengan kapasitas yang memadai untuk masyarakat berisiko?		
90	Apakah tempat evakuasi dapat digunakan oleh masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi di desa/ kelurahan?	v	
91	Apakah tempat evakuasi sudah dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar minimum ?	v	
92	Adakah tempat evakuasi sementara ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/ kelurahan?	v	

Indikator 24. Jalur Dan Rambu Evakuasi

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
93.1	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke tempat evakuasi masyarakat?	V	
93.2	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia rambu evakuasi yang mengarah ke tempat evakuasi masyarakat?	V	
94.1	Apakah jalur evakuasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi ?	V	
94.2	Apakah rambu evakuasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi ?	V	
95.1	Apakah jalur evakuasi ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan?	V	
95.2	Apakah rambu evakuasi ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan?	V	

96.1	Apakah jalur evakuasi yang tersedia, dapat digunakan desa/kelurahan tetangga?	V	
96.2	Apakah rambu evakuasi yang tersedia, dapat digunakan desa/kelurahan tetangga?	v	

Indikator 25. Adanya Latihan Kesiapsiagaan Bencana Secara Berkala Dan Berkelanjutan Tingkat Desa/Kelurahan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
97	Adakah latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana (simulasi) yang dilakukan oleh masyarakat di desa/kelurahan?	v	
98	Apakah seluruh komponen masyarakat (masyarakat umum, pemerintahan, swasta, sekolah dll) terlibat dan berpartisipasi aktif dalam latihan (simulasi) ini?	v	
99	Apakah desa/kelurahan melakukan latihan (simulasi) bersama dengan desa/kelurahan tetangga dalam kawasan rawan bencana?	v	
100	Apakah latihan tersebut dilaksanakan secara periodik?		v

Indikator 26. Tersedianya Relawan Penanggulangan Bencana Desa Atau Kelurahan Yang Memiliki Kemampuan Dalam Melakukan Penanganan Darurat Bencana

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
101	Apakah desa/kelurahan memiliki relawan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat saat terjadinya bencana?	v	
102.1	Apakah para relawan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pertolongan pertama	v	

	saat terjadi bencana?		
102.2	Apakah para relawan berlatih secara periodik untuk meningkatkan keterampilannya?	v	
103	Apakah para relawan didukung dengan peralatan yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing?	v	
104	Apakah relawan tersebut didukung oleh pemerintah desa/kelurahan untuk aktivitasnya?	v	

Komponen 5 Kesiapsiagaan Pemulihan

Indikator 27. Tersedianya Berbagai Mekanisme Yang Ditujukan Untuk Upaya Pemulihan Dini Bencana Di Tingkat Desa/Kelurahan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
105	Apakah sudah ada mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri untuk:		v
106	Apakah ada mekanisme pemulihan dini secara Mandiri untuk fungsi:	v	
107	Apakah ada mekanisme pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan fungsi?	v	
108	Apakah mekanisme pemulihan dini di evaluasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan.	v	

Indikator 28. Tersedianya Perencanaan Pemulihan Berkelanjutan Untuk Berbagai Aset Dan Properti Strategis Yang Berisiko Tinggi Rusak Terkena Bencana

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
109	Apakah ada mekanisme penilaian secara mandiri	v	

	fasilitas yang berada di lokasi paling berisiko tinggi		
110	Apakah ada rencana untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana?	v	
111	Apakah fasilitas tersebut dibangun kembali di daerah lebih aman?	v	
112	Apakah mekanisme pemulihan berkelanjutan di evaluasi dan diperbaharui?	v	

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

P: Penanya
N: Narasumber

1. Wawancara Kepala Dusun Kalitengah Lor

P: Bagaimana pengelolaan risiko bencana di Dusun Kalitengah Lor ini?

N: Itu harus berhubungan dengan wisata *nggih*, Mas?

P: Semuanya, Pak. Tidak harus wisata, (bisa) pertanian, ternak, segala macam yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

N: Kalau tentang masyarakat, kita bicara masyarakat dulu ya. Itu memang pengelolaannya sebetulnya kita sebelum 2010 sudah punya, kalau dulu namanya tim evakuasi. Tahun 2009 sudah kita bentuk, selang 1 tahun terpakai. Setelah 2010 itu kita ganti nama menjadi PRB, Pengurangan Risiko Bencana. Di dalam Lembaga itu termasuk anggotanya sekitar 80, itu sudah dibagi-bagi tugasnya. Jadi, si A si B itu sudah diberi tugas sendiri-sendiri. Misalnya, ada yang pendataan mengurus lansia, kelompok rentan, ada yang pendataan hewan, ada yang pendataan seluruh warga, begitu. Terus itu sudah dibuat SOP, skenarionya itu sudah dibuat. Jadi ini jalur evakuasinya, trus kalau terjadi itu titik kumpulnya disini, larinya kesini, berhentinya disini, itu sudah dibuat semua.

P: Jadi kalau mengungsi diarahkan kemana, Pak?

N: Kalau dulu, itu menurut SOP nya ke Barak Banaran.

P: Itu dimana ya, Pak?

N: Termasuk (di desa) Argomulyo. Tapi untuk 2019 kemarin, karena yang diberi rekomendasi (untuk mengungsi) cuma Kalitengah Lor, itu cukup di Desa Glagaharjo. Itu kira-kira jaraknya di bawah 5 kilo.

P: Kalau untuk hewan itu *pripun*, Pak untuk mengevakuasinya?

N: Kalau hewan itu karna sudah ada tim evakuasi khusus hewan, itu juga kita rebug, terus nanti tentang pelaksanaannya kalau misalnya armada-armada disini kurang ya kita ke Kecamatan, BPBD, tapi kalau disini cukup ya tidak perlu.

P: Oh, langsung ya Pak berarti.

N: Iya mas.

P: Kemudian terkait arus informasi, bagaimana arus informasi tentang bencana bisa sampai ke telinga masyarakat dusun Kalitengah Lor?

N: Kalau itu kita nunggu info resmi mas. Jadi tidak sembarang kabar kita terima, harus resmi dari BPBK, BPBD, Bupati, Kecamatan Desa, langsung pak Dukuh. Kita nunggu itu aja. Kalau cuma kabar-kabar yang belum pasti *nggak* bisa kita terima. Informasi yang resmi itu lalu kita sebarkan ke warga, melalui grup-grup WA. Ada grup per RT, ada grup PKK, dst. Itu kan sudah menjangkau ke semuanya. Misalnya ada kabar yang akurat kita kumpulkan tim tadi, yang 80 orang tadi, untuk koordinasi.

P: Apakah ada permasalahan terkait evakuasi, Pak? Misalnya warga yang ngeyel, atau mungkin warganya sudah memiliki inisiatif untuk evakuasi diri?

N: Kalau sebelum 2010, kita untuk menghadapi masyarakat awam seperti ini agak kesulitan. Jadi, kita dicaci maki setelah 2006 itu. Tapi setelah 2010 itu sudah mudah mas.

P: Apa saja sarana prasarana yang dimiliki oleh dusun Kalitengah Lor dalam hal penanganan bencana?

N: Yang jelas dari swadaya masyarakat itu ada transportasi, misalnya mobil, motor itu kan sudah punya. Jadi semua KK sudah punya motor. Nah kalau yang belum punya itu nanti dirembug, kamu bawa sana, kamu bawa sana. Yang punya mobil bisa dirembug bareng-bareng. Untuk evakuasi ternak sudah ada truk, armada, *gajlukan*, untuk menaikkan sapinya atau hewannya pake *gajlukan* dari besi biar cepat.

P: Kalau EWS untuk peringatan dini ada tidak Pak?

N: Ada. Di atas sini (di masjid). Kalau itu resmi nanti ada sirenenya, pakai status ada. Tapi kadang kan Merapi tidak menggunakan status, tiba-tiba erupsi. Itu nanti bekerjanya kan sudah dipasang kamera, yang menyalakan dari pusat.

P: Ada tidak program pelatihan dan sosialisasi kebencanaan yang diterima oleh masyarakat dusun Kalitengah Lor?

N: Kalau sosialisasi pernah. Dari BPBK itu pernah, misalnya ada kejadian (bencana) itu yang harus disiapkan apa, saat meninggalkan rumah yang harus dibawa apa saja, yang harus dimatiin apa misalnya kompor, listrik. Sudah ada pelatihan.

P: Pelatihan P3K ada juga Pak?

N: Kalau P3K belum mas.

P: Hingga saat ini, apa yang masih perlu dievaluasi atau perlu ditingkatkan pada penanganan bencana di desa Glagaharjo, terutama di dusun Kalitengah Lor ini?

N: Yang sekarang sudah terpikirkan tapi belum ada pelaksaannya itu kandang ternak mas. Maksudnya, kandang yang standar mas. Kalau untuk shelter kandangnya itu sudah ada, sudah disiapkan, tapi yang standar belum. Misalnya, kandang sapi potong bentuknya seperti ini, sapi perah seperti ini kan belum.

P: Itu perbedaannya apa ya Pak? Standar kandang sapi potong dan sapi perah itu bedanya apa ya Pak? Saya juga belum tahu.

N: Kalau sapi potong itu asal ada tempat makan, tempat minum, itu sudah cukup. Kalau sapi perah itu yang repot, karena kalau memenuhi standar agak susah. Jadi (yang standar itu) kita misalnya punya sapi 50, disitu nanti kita tidak usah membagikan minuman, karena sudah ada alatnya (yang mengalirkan minuman). Terus nanti misalnya airnya berkurang sudah otomatis bertambah sendiri.

P: Selain tentang ternak ada lagi tidak Pak yang perlu dievaluasi?

N: Kayaknya cuma itu mas.

P: Kalau kemarin terkait Covid-19 itu Pak, saat 2019 itu kan erupsi, Merapi siaga, disaat bersamaan ada Covid-19, jadi tidak boleh ada kerumunan. Nah itu proses evakuasinya bagaimana Pak?

N: Itu ada tekniknya sendiri mas. Jadi tidak seperti yang 2010. Sudah ada caranya, misalnya 1 keluarga ayah ibu sudah ada tempatnya di sekat-sekat, jadi *nggak* mengumpul semua begitu, ada sekat-sekatnya. Sudah disetting di Barak sana.

P: Apakah bapak turut serta dalam penyusunan rencana kontingensi erupsi merapi desa Glagaharjo?

N: Iya mas, saya diajak untuk menyusun. Misalnya membuat SOP tadi, persiapan-persiapan misalnya terjadi (bencana) kita dipandu untuk ikut membicarakan itu.

P: Biasanya ada rapat rutin tidak Pak? Misalnya 1 minggu, atau 1 bulan sekali, membicarakan kesiagaan bencana?

N: Kalau terkait rutinnnya belum. Tapi kalau misalnya ada kabar-kabar, terutama dari Pak Lurah, kita sudah harus mempersiapkan segalanya.

P: Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak.

N: Sama-sama mas.

2. Wawancara Kepala Dusun Srunen

P: Bagaimana pengelolaan risiko bencana erupsi Merapi di Dusun Srunen ini? Apakah sudah ada langkah-langkah yang diterapkan di dusun ini Pak?

N: Sudah mas. Kita pengalaman dengan adanya erupsi Merapi, kan tidak hanya tahun 2010, (sejak) 94 saya sudah mengalami hal itu. Tapi yang sangat (membuat) sadar itu setelah kejadian 2010 itu. Jadi kalau dulu-dulunya, masyarakat kami itu istilahnya pas keadaan Merapi aktif itu malah melihat-lihat. Tapi setelah 2010, mereka sadar bahwa keadaan seperti itu membahayakan. Kalau tentang cara pengurangan risiko itu ada semacam PRB nya mas. Kita bikin SOP. Diantaranya untuk dikatakan tangguh bencana yang jelas ada antisipasi menghadapi Merapi bila meletus, itu sudah ada (caranya) secara kepengurusan begitu, yang bentuknya SOP tadi. Ada seksi evakuasi, pendataan, aset-aset warga, surat-surat berharga, kendaraan, sapi, dsb, disana sudah ada mas.

P: Kalau di dusun ini sendiri apakah ada sarana prasarana yang mendukung peringatan dini atau sebagainya?

N: Ada EWS mas. Dan bahkan masyarakat banyak yang mempunyai HT.

P: Berarti untuk arus informasinya melalui HT itu ya Pak?

N: Iya, diantaranya. Biasanya kalau cuaca gelap, lewat HT sudah tahu. Kan ada sinyalnya itu mas, (misalnya) sinyal banjir, erupsi Merapi sudah ada tanda-tandanya.

P: Biasanya informasinya dari mana Pak?

N: Kalau keadaan landai, biasa-biasa saja, masyarakat sudah memahami tentang itu. Tapi kalau memang gunung dikatakan keadaan genting, ada informasi dari BPPTKG, BPBD, Kecamatan, Kelurahan, dusun-dusun.

P: Kalau sosial media ada Pak?

N: Kalau sosial media pakai grup WA biasanya.

P: Ada tidak program pelatihan dan sosialisasi kebencanaan yang diterima oleh masyarakat Dusun Srunen?

N: Kalau pelatihan, berulang kali sudah pernah ada mas. Dulu sehabis erupsi Merapi, ada pelatihan tingkat dusun. Bahkan terakhir itu sampai (misalnya) kalau kerja di ladang, pakai kartu cetel (sebagai tanda sedang ke ladang). Misalnya yang ke ladang belum pulang kan kartunya masih disitu, jadi mudah melacaknya. Sudah pada punya (kartunya) beberapa, tapi belum dipraktikkan.

P: Biasanya pelatihan yang diberikan itu tentang apa Pak?

N: Tentang bahaya letusan Merapi itu bagaimana, macam-macam bahayanya. Terkait kesiapsiagaan bagaimana mengevakuasi, melihat saudara/tetangga yang terluka itu diajari dan dipraktikkan, ada pertolongan pertama.

P: Hingga saat ini, apa yang masih perlu dievaluasi atau perlu ditingkatkan pada penanganan bencana di desa Glagaharjo, terutama di Dusun Srunen ini?

N: Kalau Dusun Srunen, untuk saat ini yang telah disediakan pemerintah diantaranya barak. Tapi yang belum ada yaitu barak hewan, sampai saat ini belum ada. Bahkan (kami) sudah mengusulkan evakuasi ternak dan memohon ada tempat khusus, tapi belum ada. Yang utamanya (untuk dievakuasi) baru jiwa (manusia).

P: Selain tentang evakuasi ternak ada lagi tidak Pak yang perlu dievaluasi?

N: Yang sangat mendesak itu mas, evakuasi ternak yang belum ada. Yang penting itu kan hewan mas. Untuk warga, hewan itu adalah salah satu tabungan keluarga, misalnya ditinggal ngungsi tapi hewannya mati disini kan pasti sedih.

P: Kalau warga disini ada yang mengadakan semacam komunitas tidak Pak?

N: Ada, kalau disini KSM, Komunitas Siaga Merapi. Itu bekerjasama dengan dusun. Bila terjadi apa-apa, KSM sangat membantu evakuasi warga.

P: Biasanya KSM datang ke dusun memberi bantuan, atau memang sudah sejak awal kerjasama Pak?

N: Sejak awal sudah kerjasama mas. KSM itu milik desa. Warga disini juga bagian dari KSM, banyak yang masuk KSM dari dusun Srunen.

P: Biasanya anggotanya muda-muda atau sudah bapak-bapak, untuk KSM *niku* Pak?

N: Ada keduanya mas, campur. Apalagi penanganan seperti *supply* air itu mas, kalau tidak dibantu KSM ya agak kesulitan. Artinya kesulitan, untuk komunitas itu sendiri diminta bantuannya untuk (memberi) air pada masyarakat.

P: Untuk *supply* air itu prosesnya bagaimana Pak?

N: Pakai tangki-tangki air mas, dari masyarakat menyediakan berbagai macam torrent.

P: Apakah bapak turut serta dalam penyusunan rencana kontingensi erupsi merapi desa Glagaharjo?

N: Iya mas. Saya terutama dengan warga, menyiapkan warga bila terjadi sesuatu kita selalu koordinasi dengan masyarakat, ada bukunya.

P: Biasanya ada masalah tidak Pak dalam melakukan koordinasi dengan masyarakat?

N: Kalau selama penanganan warga tidak ada masalah mas. Yang jadi masalah itu misalnya kalau Merapi erupsi kendala utamanya yang hewan

itu tadi. Kalau jiwanya kan mudah, tapi kalau hewannya tidak bersamaan dengan pemeliharanya kan jadi susah. Jadi harus naik turun, istilahnya.

P: Untuk evakuasi hewan biasanya pakai apa Pak?

N: Pakai truk mas.

P: Semisal terjadi erupsi, hewan-hewan yang disini akan dibawa kemana Pak? Sedangkan belum punya barak hewan.

N: Kalau kemarin yang Kalitengah Lor itu di samping balai desa. Tapi itu khusus untuk dusun Kalitengah Lor, karena kemarin yang direkomendasikan mengungsi hanya Kalitengah Lor, yang lain hanya siaga. Untuk saat ini imbuhan dari pemerintah kan 3 kilo dari puncak yang harus dikosongkan, sudah sejak dulu (akhir 2019) sejak status Merapi naik siaga.

P: Itu pengungsiannya bagaimana Pak? Saat Merapi siaga, disaat bersamaan ada Covid-19, jadi tidak boleh ada kerumunan. Nah itu proses evakuasinya bagaimana Pak?

N: Kalau mengungsinya kemarin di sekat-sekat itu mas. Jadi mengungsinya per keluarga, dibuat semacam kolam-kolam begitu. Itu di barak Glagaharjo, di belakang balai desa Glagaharjo. Kalau yang di Srunen ya dulu sudah disiapkan, bahkan ada sekat-sekatnya di barak Sindumartani. Tapi yang direkomendasikan paling utama kan dari keluarga rentan itu segera diungsikan, hanya dusun Kalitengah Lor.

P: Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak.

N: Sama-sama mas.

3. Wawancara Ketua KSM

P: Perkenalkan saya Lexi Jalu Aji dari Universitas Pertahanan Pak. Pertama-tama saya ingin mengetahui profil Bapak terlebih dahulu, boleh diberitahu nama lengkap dan pendidikan terakhirnya Pak?

N: Rambat Wahyudi. Pendidikan terakhir SMA.

P: Kapan KSM dibentuk?

N: KSM dibentuk setelah erupsi Merapi 2010, tepatnya tanggal 5 Juni 2011.

P: Dibentuknya atas inisiasi siapa Pak?

N: Dulu inisiasi kami semua, warga yang peduli terhadap mitigasi bencana. Intinya, dulu kan sebelum erupsi 2010, terkait mitigasi bencana kan sangat kurang sekali untuk desa Glagaharjo. Jadi 2010 itu kocar-kacir lah istilahnya, (belum tahu) gimana cara mengelola barak, cara evakuasi, dsb, kita belum bisa mandiri. Setelah pasca erupsi itu, kami merasa tergerak untuk, ya kalau bisa menolong orang lain, setelah sudah ditolong orang. Waktu itu kan Cuma berawal dari komunikasi lewat HP, kami membentuk komunitas relawan, yang tujuannya ya tidak lain untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemanusiaan, khususnya mitigasi Merapi.

P: Apakah ada landasan hukum pembentukan KSM, berkaitan dengan Legalitas KSM di Desa glagaharjo? KSM sudah dilegalkan berarti ya Pak?

N: Sudah mas, masuk lembaga nonformal. Sudah ada SK nya. Baru sekitar awal 2016 dilegalkan. Dulu kami masih mandiri, beli apa-apa sendiri, kalau sekarang sudah (diurus) pak Lurah, dijadikan lembaga desa supaya bisa akses (bantuan) dana.

P: KSM beranggotakan siapa saja?

N: Didominasi oleh warga desa Glagaharjo, dan juga sebagian ada dari desa sebelah, desa Argomulyo.

P: Setiap desa itu ada lembaganya sendiri-sendiri ya Pak?

N: Iya, ada Linmas, PKK, Karang Taruna, PRB.

P: Apakah ada komunitas semacam KSM ini tapi di desa yang lain Pak?

N: Oh itu ada banyak, terkait bencana itu dulu ada SKSB (Saluran Komunikasi Sosial Bersama), di Kepuharjo, dibentuk tahun 2000-an, dulu itu mencakup seluruh Cangkringan. Pasca 2010, tiap desa berinisiasi membentuk komunitas sendiri-sendiri. Kalau di Argomulyo itu namanya AMC (Argo Merapi Community). Kalau Umbulharjo itu KSB (Komunitas Siaga Bencana).

P: Apa saja program kerja dari KSM?

N: Terutama tentang mitigasi bencana mas. Kami yang paling utama adalah antisipasi pra dan pasca bencana Merapi.

P: Berarti itu berupa sosialisasi begitu Pak?

N: Iya, kami sosialisasi ke warga terkait keadaan Merapi seperti apa, kalau ada informasi BPKG normal siaga awas kami teruskan ke warga. Selain itu, jika ada kecelakaan atau apa, kami turut serta (membantu). Tidak hanya tentang bencana Merapi, tapi khususnya Merapi. Termasuk yang Covid kemarin itu kami juga ikut membantu dalam tim pencegahan Covid, ini ada poskonya disini.

P: Selain itu, untuk pelatihan ada Pak?

N: Ada. Kami programkan setiap tahun. Ada PPGD (Pelatihan Penanganan Gawat Darurat), ada SAR darat, dsb.

P: Apakah ada kerjasama dengan pihak AMC, dll?

N: Ada mas, kami saling bantu-membantu. Misalnya ada angin ribut, kami kekurangan peralatan, ya kami di *back-up* oleh teman-teman (dari AMC). Jadi saling bekerjasama, misalnya ada kecelakaan apa, disana tidak punya keahlian, kami punya keahlian, kami dimintai tolong, seperti itu. Kebanyakan kalau disini kalau tidak Merapi, ya angin. Kecelakaan di jalur gede, daerah tambang itu jarang, baru sekali.

P: Apa saja sarpras yang dimiliki oleh KSM?

N: Saat ini ada ambulans 2 unit, posko 1 di kelurahan, dan pos pemantauan Gunung Merapi di objek wisata Teras Merapi di Kalitengah Kidul.

P: Berarti ada ahli yang tentang gunung disitu Pak?

N: Kalau kami enggak. Kami disana sifatnya hanya mengandalkan penglihatan dan pendengaran, kami tidak punya basis teknologi, CCTV, dsb. Kan ada seismograf, lalu lewat HT kami amati di pos sana, disana ada fasilitas sirine, jika ada keadaan bahaya darurat mengenai Merapi kami bunyikan, supaya warga semuanya segera mengetahui. Terus, alat-alat seperti gergaji juga punya.

P: Apakah ada program peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh KSM untuk anggota atau masyarakat desa Glagaharjo? Apakah dilakukan secara rutin atau tidak?

N: Ada, setiap tahunnya kami lakukan, sudah masuk program.

P: Berapa jumlah anggotanya Pak?

N: 40.

P: Didominasi oleh anak muda atau yang sudah dewasa Pak?

N: Ya semuanya ada. Ada yang lebih tua dari saya. Kalau anak muda belum kami regenerasi, jadi saat ini anggotanya (berusia) 35 tahunan ke atas.

P: Apakah ada evaluasi dari KSM?

N: Ada, kami setiap bulan ada pertemuan. Pasti selalu ada evaluasi.

P: Apa kendala yang dialami KSM?

N: Kami kan ada pos pengamatan, (disitu) kami belum ada CCTV, kalau yang lain kan sudah ada CCTV dan sebagainya, kami belum ada. Jadi kendalanya belum ada pemantauan yang berbasis teknologi, hanya mengandalkan indera penglihatan dan pendengaran. Kalau yang lain sudah tidak ada kendala, peralatan2 dsb, HT kami sudah punya, karna disini susah sinyal jadi kami mengandalkan HT.

P: Kalau dana dari desa cukup ya Pak?

N: Cukup. Misalnya, tahun ini kami ada program apa, nanti kami ajukan lewat pusat, kami mau kegiatan ini biayanya seperti ini, nanti ada (bantuan dana) dari kelurahan.

P: Apakah KSM turut mengajukan usulan atau melakukan advokasi ke BPBD Sleman?

N: Justru mereka yang mengajak kami. Misalnya, di Sleman ada pelatihan apa, kami diajak. Jadi kami afiliasinya ke BPBD Sleman, nanti ketika disini ada bencana, kami tidak mempunyai kapasitas penuh, misalnya disini terlalu banyak pohon tumbang, sedangkan gergaji mesin kami hanya 2, kami minta *back-up* an dari komunitas yang lain dan juga BPBD. Lapornya pun juga harus ke BPBD. Program pelatihan, sosialisasi,

lapor ke BPBD juga, tidak harus resmi membuat laporan, namun memberi informasi saja ke BPBD bantuan-bantuan apa yang diperlukan.

P: Apakah KSM turut berpartisipasi dalam penyusunan rencana kontingensi desa Glagaharjo?

N: Oh iya ikut. Kemarin dilibatkan dalam kontingensi Merapi. Kami difokuskan ke evakuasi dan pengamatan gunung Merapi, dan *back up* kegiatan di Barak.

P: Selain dana dan SK, apa saja dukungan yang diperoleh KSM dari pihak Desa?

N: Selama ini ya support dana, ya masalah pembiayaan itu saja sih mas.

P: Apa KSM turut bekerja sama dengan pihak luar desa?

N: Tidak ada mas. Hanya komunitas di daerah-daerah lain, BPBD, dan kelurahan.

P: Dari universitas-universitas tidak ada ya Pak? Misalnya UPN, UGM, itu kan ada jurusan Manajemen Bencana juga.

N: Tidak mas. Kalau ada ya paling hanya seperti ini, (misalnya) ada penelitian, kami diwawancara, begitu saja. Makanya kami juga sering bertanya, kalau universitas, setelah ini ada tindaklanjutnya apa tidak, biasanya itu stop disitu saja, padahal kami masih membutuhkan pengalaman, kerjasama dsb dari pihak-pihak lain.

P: Kalau kemarin saat Merapi erupsi, ada wartawan yang mengunjungi dan mewawancarai Pak?

N: Ada, kalau wartawan sering mas.

P: Tahun 2020 lalu saat Merapi siaga, disaat bersamaan ada Covid-19, itu mengungsinya bagaimana Pak?

N: Di sekat-sekat baraknya. Lalu ada pos cuci tangan, hal-hal yang kaitannya dengan protokol kesehatan disiapkan. Ini kan posko kami disini juga skrining kesehatannya sudah mudah, ada cek suhu, cuci tangan, semua sudah disiapkan.

P: Daerah yang masuk kawasan rawan bencana 3 itu ada 3 dusun ya Pak kalau tidak salah?

N: Iya. Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor.

P: Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak.

N: Sama-sama mas.

4. Wawancara Kepala BPBD Sleman

P: Perkenalkan saya Lexi Jalu Aji dari Universitas Pertahanan Pak. Pertama-tama saya ingin mengetahui profil Bapak terlebih dahulu, boleh diberitahu nama lengkap dan pendidikan terakhirnya Pak?

N: Haenry Dharma Widjaja, S2 Magister Pendidikan (Pendidikan IPS). Saya dulu di Dinas Pendidikan selama 24 tahun, kemudian dipromosikan kesini.

P: Apa saja yang BPBD berikan kepada pihak desa untuk mendukung program Destana?

N: Yang jelas Destana itu peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi masyarakat dilatih tentang ancaman bencana, kerentanan yang ada, kita beri peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk pengurangan risiko bencana. (Langkah-langkahnya) pertama mereka kita buat forum pengurangan risiko bencana, disitu ada kepengurusannya, kemudian mereka kita latih membuat rencana kontingensi, penanggulangan bencana, dan membuat SOP penanganan bencana. Di forum pengurangan risiko bencana itu kan ada beberapa bidang, ada bidang peringatan dini, data informasi, evakuasi, transportasi, kesehatan, logistik, keamanan, dll, mereka dilatih membuat SOP tiap-tiap bidang. Setelah itu, kita latih juga membuat peta kerentanan di daerah, kita sampaikan, kita diskusikan. Untuk rencana kontingensi itu untuk ancaman yang paling dominan di daerah tersebut, misalnya kalau daerah lereng Merapi ya ancamannya erupsi Merapi, nanti disana ada matriks untuk penilaian risiko. Jadi ada ancaman, dampaknya, dan ada nilainya, nilai yang paling besar itu yang paling dominan. Kemudian membuat rencana kontingensi penanggulangan bencana tersebut, ada dokumen RPB dan RenKon (Rencana Kontingensi). Terakhir, mereka kita kukuhkan dengan

mengadakan simulasi Gladi Lapang, lalu dibentuk menjadi desa tangguh bencana (Destana).

P: Jadi secara real dilapangan, yang membedakan antara destana dengan desa biasa itu kesadarannya ya Pak?

N: Iya artinya yang sudah dilatih itu kan mereka jadi ada peningkatan kapasitas untuk penanganan bencana, Destana itu programnya.

P: Apakah pelatihan dan sosialisasi dari BPBD kepada masyarakat dilakukan secara rutin Pak?

N: Iya rutin. Kalau pembentukan Destana tiap tahun rutin. Sebelum Covid, tiap tahun kita membentuk 8 Destana dan 8 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana). Kemudian berhubung ada pandemi Covid, anggaran banyak yang di *refocusing*, maka tahun ini kita hanya bisa 2 Destana. Tetapi dari provinsi ada anggaran untuk melaksanakan, dari provinsi ada 6. Jadi untuk tahun ini kita bentuk juga 8. Sekarang dari seluruh kelurahan yang ada sudah terbentuk 69 Destana, kalau sekarang di DIY namanya Keltana. Jadi untuk tahun depan kita masih sisa 17. Targetnya untuk 2023 semua desa sudah tangguh bencana. Seharusnya jika tidak ada pandemi, 2021 ini target sudah terlaksana semua desa, tapi berhubung ada pandemi, anggaran banyak dialokasikan ke penanganan Covid, jadi dimundurkan.

P: Apakah ada pelatihan dan sosialisasi yang diberikan secara rutin kepada masyarakat?

N: Iya ada mas sering. Kami sering memberikan pelatihan relawan, misalnya pelatihan pertolongan pertama, pelatihan dapur umum, pelatihan SAR, pelatihan pertukangan, pelatihan evakuasi medis, dan banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk komunitas relawan. Kami untuk melatih tidak khusus di Destana, tapi kami memang komprehensif seluruh Kabupaten Sleman, termasuk juga Destana.

P: Selain Destana dan SPAB, apakah ada langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang diberikan kepada masyarakat?

N: Langkah mitigasinya kita menginformasikan informasi bencana dan peringatan dini kepada masyarakat. Jadi, di BPBD itu ada Pusdalop (Pusat Pengendali Operasi), disana sering menerima informasi dari BPPTKG terkait kondisi Merapi bagaimana, ada guguran, akan terjadi letusan, luncuran lava berapa kilometer, dll itu selalu kita informasi ke masyarakat. Ada WA, Twitter, dan ada HT. Kemudian, kita juga memasang EWS di tempat-tempat yang strategis untuk mengetahui ancaman, disana EWS itu ada perangkat CCTV, sekitar ancaman ada erupsi Merapi, banjir lahar hujan, ada yang ke sungai, jembatan, jadi semua titik rentan itu kita kasih EWS dengan kamera yang tersambung dengan Pusdalop, ada sirine untuk warga sekitar agar bisa segera evakuasi. Serta mitigasi fisik lainnya yaitu kita memasang rambu-rambu jalur evakuasi, peringatan KRB 1, 2, 3. Kemudian kita perbaiki jalur evakuasi yang rusak-rusak, walaupun itu bertahap kita tangani dengan kekuatan yang cor beton. Karena daerah KRB 3 itu kan tidak boleh ada pembangunan, ketentuannya KRB 3 itu dikosongkan, tidak boleh dibangun, tapi disana kan ada wisatawan, ada orang yang sering merumpuk disana lewatnya jalur itu, kemudian nanti kalo ada ancaman dan jalurnya rusak kan rentan, tidak bisa evakuasi cepat, maka untuk pembangunan dengan alasan mitigasi itu masih dibolehkan.

P: Apakah BPBD Sleman turut melakukan kerjasama dengan Pihak atau lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri?

N: Iya sering. Tahun lalu, kita membuat rencana kontingensi untuk perencanaan erupsi Merapi bekerjasama dengan UNICEF. Kemudian disini ada lembaga-lembaga nongovernment, ada LSM, ada Emergency Service, KIPA, LINGKAR. Dari akademisi kita sering membuat analisis risiko dampak bencana kita mendatangkan akademisi, kadang dari UGM, UPN, sesuai dengan kompetensi mereka. Kalau dengan dunia usaha, sering juga, misalnya kemarin kita koordinasi dengan PLN untuk pengadaan penanganan Covid, dengan CSR perusahaan-perusahaan di Sleman sering pengadaan logistik. Dengan kementerian lembaga sering

juga, dalam negeri. Kemudian dengan BPBD DIY, BNPB tentunya. Dengan PERS juga, membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang penanganan bencana.

P: Berkaitan Program Sister Village, saya belum menemukan pembahasan terkait Sister Village di beberapa dokumen milik BPBD, bisa dijelaskan bapak terkait program Sister Village ini?

N: Jadi Sister Village itu sebenarnya Persaudaraan Desa, dimana mereka mengadakan kerjasama, apabila desa yang terdampak harus evakuasi karena ancaman bencana, mereka evakuasi ke desa tetangga. Mereka sudah mengadakan MoU, nanti jaraknya dimana, mengungsinya berapa orang, biayanya bagaimana, logistiknya bagaimana, sarana di pengungsian apa saja, untuk makan minum sandang dll itu bisa terpenuhi dengan ini.

P: Apa evaluasi program destana di Kabupaten Sleman, terutama di Wilayah kecamatan Cangkringan? Kendala apa yang sering didapatkan dalam pelaksanaannya?

N: Kendala itu pasti ada ya. Dalam pembentukan itu dari sisi kepesertaan harus dari beberapa komponen masyarakat, ada pamong desa, kelompok tani, kelompok PKK, Karang Taruna, Linmas, relawan, dll itu banyak. (Kendalanya yaitu) terkadang pada saat kita mengadakan pelatihan, mereka juga punya prosesi sendiri-sendiri, waktunya sulit bertemu. Kalau kita mengadakan siang hari, maka yang punya pekerjaan siang hari tidak bisa ikut, begitupun jika malam. Tapi itu tetap bisa diatasi. Kemudian ada yang pernah menolak menerima program, biasanya karena mereka sibuk, dengan dalih tertentu, misalnya ada pilihan lurah, padahal sudah kita anggarkan untuk desa itu, akhirnya kita harus pindah ke desa lain. Kendala anggaran juga ada, misalnya tahun 2020 sudah dianggarkan 8 desa, tapi karena ada *refocusing*, akhirnya hanya 2 desa.

P: Apakah destana yang sudah ada pernah dilakukan penilaian?

N: Pernah, penilaian dalam bentuk lomba. Sebelumnya, setelah 1 tahun kita latih berapa Destana, kita adakan penilaian dengan lomba, sehingga

kita bisa tahun program destana itu bisa berjalan atau tidak disana. Mereka harus mengisi komponen-komponen yang ada di instrumen lomba tersebut, otomatis akan dinilai; kerentanan apa yang sudah mereka kurangi, peningkatan kapasitas apa yang sudah mereka berikan, SDM nya bagaimana, ketersediaan sarpras, program pelatihan, dll.

P: Apakah dokumen penilaian Destana Desa Glagaharjo dapat saya akses?

N: Glagaharjo itu dibuat tahun 2014/15. Kalau dokumen penilaian ada di kantor ini, mereka sebenarnya juga punya, pada saat lomba kan mereka sudah punya dokumennya.

5. Wawancara Carik Glagaharjo

P: Perkenalkan saya Lexi Jalu Aji dari Universitas Pertahanan Pak. Pertama-tama saya ingin mengetahui profil Bapak terlebih dahulu, boleh diberitahu nama lengkap dan pendidikan terakhirnya Pak?

N: Joko Purwanto, pendidikan terakhir SMK.

P: Baik Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya dahulu Pak, apakah ada penilaian dari BPBD atau pusat tentang program Destana di Desa Glagaharjo ini?

N: Kalau penilaian itu (persisnya) saya lupa mas. Tapi kalau untuk kegiatannya memang kemarin dari BPBD yang memfasilitasi untuk desa ini.

P: Desa Glagaharjo ditetapkan sebagai Destana sejak tahun berapa?

N: Sekitar tahun 2015-16 itu mulai penyusunan mitigasi bencana, tapi kalau secara riil penetapannya saya lupa mas, karena saya belum masuk disini, masih sebagai peserta saja.

Komponen 1: Kualitas dan Akses Layanan Dasar

Indikator 1: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kualitas Yang Baik Dan Mudah Dicapai Oleh Masyarakat

P: Apakah di desa terdapat fasilitas Pendidikan formal dan/atau non-formal?

N: TK ada 3, SD ada 3, SMP tidak ada.

P: SD dan TK nya sudah ada yang masuk sebagai Sekolah Siaga Bencana ya Pak?

N: Ada mas, terutama yang SD.

P: Apakah fasilitas-fasilitas tersebut mudah dicapai oleh masyarakat?

N: Mudah, aksesnya di pinggir jalan.

P: Apakah fasilitas-fasilitas tersebut mempunyai kualitas yang baik?

N: Iya, kualitasnya cukup baik.

P: Apakah di desa terdapat program peningkatan jumlah/fungsi fasilitas pendidikan formal dan/atau non formal untuk membangun ketangguhan thd bencana?

N: Kalau menambah sekolah belum ada, tetapi rencana ke depannya kalau bisa ada SMP.

P: Apakah desa terlibat dalam melakukan evaluasi program peningkatan fasilitas pendidikan formal dan/atau non-formal?

N: Untuk TK dan SD pembelajarannya kami belum terlalu ikut campur. Kalau yang TK dulu pernah kita tambahkan insentif untuk mendidiknya, lalu juga pernah bekerjasama dengan guru-guru SD non-PNS, kita beri tambahkan insentif. Tapi sejak Covid ini untuk yang itu kami stop dulu. Kalau fasilitas kita fokusnya ke PAUD mas, kalau TK sama SD sudah lengkap dari Dinas Pendidikan.

P: Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas layanan fasilitas pendidikan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?

N: Untuk masukan kita sampaikan mas, kalau kecamatan kan ada rapat koordinasi pimpinan, kalau ada masukan terkait dengan pendidikan kita sampaikan disitu.

Indikator 2: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kualitas Yang Baik Dan Mudah Dicapai Oleh Masyarakat

P: Apakah di desa terdapat fasilitas layanan Kesehatan yang mudah dicapai oleh masyarakat?

N: Ada puskesmas pembantu 1 mas.

P: Apakah di desa terdapat program peningkatan kualitas layanan kesehatan guna membangun ketangguhan?

N: Ada, kita lewat posyandu, disini ada posyandu balita dan lansia.

P: Apakah desa ikut terlibat dalam melakukan evaluasi program peningkatan kualitas layanan kesehatan tersebut?

N: Kalau posyandu tetap kita evaluasi, karena itu salah satu program yang masuk kegiatan desa.

P: Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?

N: Iya mas, itu juga hasil dari posyandu mungkin ada evaluasi, itu kita sampaikan dan usahakan.

Indikator 3: Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi Yang Mudah Dijangkau Masyarakat

P: Apakah di desa terdapat sarana prasarana transportasi yang mudah dijangkau masyarakat?

N: Untuk transportasi sudah kendaraan pribadi semua mas.

Indikator 4: Tersedianya Pelayanan Publik Yang Baik

P: Apakah di desa terdapat sarana publik?

N: Ada mas. Ada lapangan, dan ada gedung Aula untuk kegiatan warga.

P: Apakah di desa terdapat program penguatan sarana publik tersebut guna membangun ketangguhan?

N: Ada, jadi kalau lapangan perlahan kita benahi, untuk gedung juga kita adakan pemeliharaan.

P: Apakah desa ikut serta dalam melakukan evaluasi program penguatan sarana publik tersebut?

N: Iya tentu mas.

P: Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sarana publik bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?

N: Kalau peningkatan jumlahnya mungkin belum, tapi kualitas kita sampaikan.

Indikator 5: Tersedianya Sistem Informasi Yang Dapat Menjangkau Seluruh Masyarakat Desa/Kelurahan Secara Cepat

P: Apakah tersedia sistem informasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat desa/kelurahan secara cepat?

N: Ada mas, kita biasanya menggunakan medsos seperti Instagram. Dulu juga ada web tapi kurang aktif, jarang diakses juga.

P: Apakah desa membuat program peningkatan sistem informasi untuk meningkatkan ketangguhan bencana?

N: Rencana ke depannya itu mau meningkatkan publikasi via online mas, jadi kalau pelayanan kita buat online.

P: Apakah desa melakukan evaluasi program peningkatan sistem informasi tersebut?

N: Ada mas, untuk pelayanannya masih kurang, seperti web dan medsos, itu perlahan kita tingkatkan.

P: Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sistem informasi untuk lebih meningkatkan ketangguhan masyarakat dan desa sekitar bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?

N: Iya mas, contohnya web nya itu kita dibantu dari Kabupaten juga, jadi pengelolaan dan cara membenahinya itu dari Kabupaten.

Indikator 6: Adanya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Yang Mandiri Dan Sumber daya Manusia Yang Berkualitas

P: Apakah desa / kelurahan melakukan tata kelola pemerintahan sesuai aturan perundangan yang berlaku?

N: Iya mas pastinya tata kelola kita sesuaikan dengan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja).

P: Apakah desa / kelurahan mempunyai program untuk peningkatan tata kelola pemerintahan menuju tata kelola yang mandiri dengan sumber daya manusia yang berkualitas?

N: Iya mas, ke depannya kita laksanakan sesuai porsinya masing-masing. Kalau kemarin itu ada tumpang tindih, contohnya ada pengurus yang sudah berumur kan mungkin masih dibawa yang dulu-dulu, nah itu kita arahkan sesuai dengan porsinya masing-masing.

P: Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi program penguatan tata kelola pemerintahan desa sesuai perundang-undangan yang berlaku?

N: Ada mas. Ada yang bukan porsinya tapi masih bisa dilaksanakan itu mas, kita mau arahkan sesuai porsinya masing-masing.

P: Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?

N: Kalau itu saat ini belum terlalu mas. Kita cenderung menyesuaikan yang ada saja.

Indikator 7: Adanya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

P: Apakah desa / kelurahan melakukan program / kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam?

N: Ada mas, contohnya lewat semacam kelompok wanita tani. Selain itu, kegiatan pengelolaan pertanian juga ada mas, untuk yang di atas itu sedang ada kegiatan tani yang sedang aktif-aktifnya. Untuk pertambangan pasir sudah dari SDM, dari desa tidak bisa ikut campur, mungkin hanya sekedar pemberitahuan aja, untuk izinnya sudah dari SDM. Disini juga ada mata air mas.

P: Untuk menjaga mata air itu bagaimana Pak?

N: Kita pantau terus mas, mata airnya itu sudah ada yang membuat, kita tinggal melakukan perawatan di mata airnya.

P: Apakah desa / kelurahan melakukan peningkatan kegiatan / anggaran untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam?

N: Ada, terutama untuk yang pertanian dan pengelolaan air itu mas.

P: Apakah ada evaluasi program / kegiatan untuk lebih baik dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan?

N: Ada, terutama untuk air mas, karena pengelolaan mata air itu kita lakukan perawatan kontinyu, misalnya ada jaringan yang sudah tidak layak, kita lakukan perbaikan.

P: Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?

N: Iya mas, terutama mata air tadi, karena selain pengelolaan desa mata air itu kan juga ada sangkut pautnya dengan kebutuhan masyarakat.

Indikator 8: Adanya Penguatan Perlindungan & Dukungan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Budaya Dan Spiritual Masyarakat

P: Apakah desa / kelurahan melakukan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat?

N: Iya mas, untuk kebudayaan itu ada kesenian, itu banyak sekali. Ada ketoprak, jathilan, campursari, dan lain-lain. Kemudian ada sendiri-sendiri itu juga masih ada. Selain itu, ada pelaksanaan upacara hari jadi Desa tapi konsepnya *kejawan* begitu mas.

P: Apakah desa / kelurahan melakukan peningkatan Jumlah kegiatan / anggaran / program perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat?

N: Iya mas, setiap tahun kita anggarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Terutama untuk kebudayaan, pasti tiap tahun ada anggaran.

P: Apakah desa / kelurahan melakukan evaluasi dan perbaikan program / kegiatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat?

N: Ada mas, terutama untuk kebudayaan-kebudayaan yang mungkin kurang aktif, kita dorong terus agar tetap bisa dilestarikan.

P: Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam kegiatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual desa / masyarakat sekitar bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?

N: Iya, karena ada kegiatan itu, kayak kesenian kan harus ada nomor induknya dari Dinas, jadi lewatnya tetap melalui Desa, meskipun yang mengajukan kelompok.

Indikator 9: Adanya Perlindungan Keamanan Masyarakat

P: Apakah desa / kelurahan memiliki mekanisme perlindungan keamanan masyarakat?

N: Limas ada mas. Lalu ada kelompok relawan juga, namanya KSM (Komunitas Siaga Merapi). Itu biasanya berkegiatan dalam kebencanaan.

P: Apakah desa / kelurahan melakukan program peningkatan kapasitas perlindungan keamanan masyarakat yang bekerjasama dengan Babinsa dan/atau Babinkamtibmas setempat?

N: Ada, setiap tahun kita adakan kegiatan, baik yang Limas dan KSM, di dalamnya sudah pasti koordinasi dengan Babinsa.

P: Apakah desa / kelurahan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme perlindungan keamanan masyarakat?

N: Ada, tiap tahun ada evaluasi terutama terkait KSM, butuh peralatan apa tiap tahun kita evaluasi.

P: Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam kegiatan perlindungan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?

N: Iya mas, terutama KSM, karena itu relawan, jadi kita koordinasinya dengan BNPB.

Komponen 2 Dasar Sistem Penanggulangan Bencana

Indikator 10: Adanya Kebijakan Pendukung Dalam Upaya Pengelolaan Risiko Bencana Di Desa/Kelurahan

P: Apakah desa memiliki kebijakan dalam upaya pengelolaan risiko bencana ditingkat desa/kelurahan?

N: Ada mas. Itu dari desa sudah membuat konsep kontingensi.

P: Apakah kebijakan tersebut didukung oleh peningkatan aktifitas atau alokasi anggaran pengelolaan risiko bencana di desa atau kelurahan?

N: Iya, jadi nanti perlengkapan-perengkapan untuk penanggulangan disitu.

P: Apakah aktifitas-aktifitas pengelolaan risiko bencana tersebut menurunkan risiko bencana di desa atau kelurahan?

N: Iya sekali mas, karena masyarakat lebih tahu antisipasinya, jadi misalnya kondisi siaga itu harus apa, terus besok kalau mungkin ada pergerakan harus kemana itu jadi lebih paham.

P: Apakah kebijakan pengelolaan risiko bencana telah mampu mendorong untuk dicontoh dan diterapkan oleh desa/ kelurahan sekitarnya?

N: Iya mas.

Indikator 11: Tersedianya Regulasi Desa/Kelurahan Untuk Pengelolaan Risiko Bencana Dalam Suatu Kawasan

P: Apakah ada kesepakatan bersama (misal: MoU, Nota Kesepahaman, dll) dengan desa/kelurahan tetangga tentang pengelolaan risiko bencana antar desa?

N: Ada mas, itu kami lakukan melalui Sister Village. Untuk desa ini kerjasamanya dengan Argomulyo dan Sindumartani.

P: Apakah kesepakatan bersama tersebut meningkatkan efektivitas kegiatan atau alokasi anggaran dalam pengelolaan kawasan risiko bencana antar desa?

N: Kalau efektifnya ada, kalau anggaran kan sudah dari BPBD, jadi untuk melihat situasi kemarin kan tidak memungkinkan melihat dari desa ini saja, perlu bekerjasama dengan desa-desa lain.

P: Apakah kesepakatan bersama tersebut berhasil menurunkan risiko di kawasan risiko bencana antar desa?

N: Iya mas.

P: Apakah bentuk kesepakatan bersama tersebut telah dicontoh dan diterapkan oleh kawasan lain?

N: Iya, tidak hanya disini yang ada konsep tersebut, daerah lain juga sudah diterapkan semacam itu.

Indikator 12: Terlaksananya Pengkajian Risiko Bencana Dan Potensi Dampak Perubahan Iklim Desa/Kelurahan Secara Berkala Dan Berkelanjutan

P: Apakah desa telah mengetahui lokasi-lokasi yang berisiko tinggi terkena bencana dan/atau dampak perubahan iklim di wilayahnya?

N: Sudah, terutama yang KRB 3 dan di tepi-tepi sungai. Di Glagaharjo ini ada 10 dusun, yang masuk KRB 3 ada 3 dusun, Kalteng Lor, Kidul dan Srunen. Kalau dusun yang terdampak tepi sungai sebenarnya hampir semua dusun, tapi untuk saat ini untuk pemukiman tidak ada.

P: Apakah desa/kelurahan telah menyusun kajian risiko bencana maupun potensi dampak perubahan iklim?

N: Sudah, masih dalam draft kontingensi tadi.

P: Apakah kajian risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa?

N: Iya mas, di kontingensi nanti kan ada alur evakuasi, fasilitas apa saja yang dibutuhkan, jadi kita perlahan melengkapi fasilitas dari situ.

P: Apakah dokumen kajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim dievaluasi secara berkala oleh komponen desa atau kelurahan?

N: Iya, terutama untuk *update* data nya mas. Kalau kontingensi sebenarnya sudah disusun sebelum pandemi, tapi berhubung ada pandemi jadi kita lakukan perubahan lagi.

P: Apakah kajian risiko bencana dan dampak potensi perubahan iklim tersebut direplikasi ke tingkat kawasan?

N: Kalau secara dokumen sepertinya belum ada, tapi kalau secara pengarahannya di masyarakat sudah kita sesuaikan dengan kontingensinya.

Indikator 13: Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan Yang Menjadi Bagian Perencanaan Pembangunan Pada Pemerintahan Vertikal

P: Apakah desa/kelurahan memiliki Rencana Penanggulangan Bencana desa/ kelurahan?

N: Sudah, rencana kontingensi tadi.

P: Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RPJMDes?

N: Iya mas.

P: Apakah RPJMDes dan RPB tersebut telah meningkatkan kegiatan atau alokasi anggaran pengurangan risiko bencana di desa?

N: Iya, terutama anggaran kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

P: Apakah RPJMDes telah mampu mempengaruhi program/kegiatan pada Rencana Strategis Kecamatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian/Lembaga Negara sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah?

N: Iya mas, karena dalam RPJMDes tidak hanya dilakukan oleh desa, tapi juga dari desa-desa yang kita usulkan ke Kabupaten harus masuk RPJMDes juga.

Indikator 14: Adanya Dukungan Lembaga Luar Untuk Pengelolaan Risiko Bencana Sesuai Dengan Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan Atau Rencana Strategis Kelurahan

P: Apakah ada dukungan lembaga dari luar desa (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan) untuk upaya pengurangan risiko bencana?

N: Ada dari BPBD, lembaga Red-R (lembaga tapi kerjasama dengan BPBD), dan juga FKKRS (Forum Komunikasi Kelompok Relawan Sleman) itu juga terlibat disitu. Kalau universitas belum terlalu aktif mas.

P: Apakah dukungan lembaga dari luar desa tersebut sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMDes/ Renstra Kelurahan?

N: Iya sudah mas.

P: Apakah dukungan lembaga dari luar desa tersebut meningkatkan jumlah dan anggaran kegiatan pengurangan risiko bencana di desa?

N: Iya meningkatkan.

P: Apakah dukungan dari luar desa mampu menurunkan risiko bencana di wilayah tersebut?

N: Iya.

Indikator 15: Adanya Penyelarasan Rencana Penanggulangan Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim Antar Desa/Kelurahan Dalam Suatu Kawasan

P: Apakah RPB desa/kelurahan diselaraskan dengan RPB desa/kelurahan tetangga?

N: Ada, yang masuk Sister Village itu tadi mas. Kalau di luar Sister Village sendiri-sendiri.

Indikator 16. Optimalitas Peran Serta Forum Pengelolaan Risiko Bencana Desa Atau Kelurahan Dalam Mewujudkan Rencana Pembangunan Desa Atau Rencana Strategis Kecamatan Untuk Kelurahan

P: Apakah desa/kelurahan sudah ada forum pengelolaan risiko bencana?

N: Ada mas, namanya PRB (Pengelolaan Risiko Bencana) itu tingkat dusun. Kalau tingkat desa itu wadahnya UnitLak (Unit Pelaksana Kebencanaan).

P: Apakah program kerja forum pengelolaan risiko bencana diperkuat dengan kebijakan desa?

N: Iya. Ada kebijakan yang mendukung, terutama untuk anggaran.

P: Apakah pelaksanaan program kerja dilakukan evaluasi setiap tahun?

N: Iya, nanti ada pembahasan terkait dengan kegiatan juga, selalu ada evaluasi tiap tahun.

Komponen 3 Pengelolaan Risiko Bencana

Indikator 17. Adanya Aksi Terpadu Pengelolaan Risiko Bencana Antara Desa/Kelurahan Dalam Suatu Kawasan

P: Apakah telah diketahui penyebab utama kerugian dari tiap-tiap bencana yang ada di suatu desa/kelurahan?

N: Iya sudah mas, untuk bencana Merapi di pemukiman misalnya jika ada awan panas, kan bisa saja ancaman terbesarnya bisa ketimbun atau bisa juga terbakar. Longsor enggak, banjir juga tidak. Kadang-kadang ada angin mas, apalagi disini banyak pohon jadi rawan pohon tumbang.

P: Apakah telah dilakukan aksi-aksi untuk mengatasi penyebab kerugian tersebut?

N: Iya mas. Misalnya dari pohon tumbang itu dari desa juga mengganggu peralatannya lewat desa, nanti pelaksanaannya ya kita evakuasi dulu untuk yang awan panas itu misalnya.

P: Apakah dalam pelaksanaan aksi-aksi tersebut melibatkan partisipasi desa-desa di sekitar anda?

N: Iya mas, terutama awan panas. Awan panas kan bisa dari pihak luar juga bisa terdampak. Untuk pohon tumbang, disini jalurnya kan perbatasan, jadi selalu menangani masalah bersama-sama dengan desa sebelah.

Indikator 18. Peningkatan Wawasan Dan Keterampilan Untuk Mengelola Risiko Bencana Melalui Edukasi, Sosialisasi Dan Literasi Kebencanaan

P: Apakah sudah ada pelatihan terkait hasil penelitian (riset terapan) untuk kebencanaan dan perubahan iklim yang sesuai dengan karakter dan potensi desa?

N: Sudah pernah ada pelatihan dari BPBD mas, contohnya seperti simulasi evakuasi, itu sudah ada.

Komponen 4 Kesiapsiagaan Darurat

Indikator 19. Tersedianya Mekanisme Untuk Mendeteksi Dini Kemungkinan Terjadinya Bencana Pada Skala Desa/Kelurahan

P: Apakah ada kelompok atau individu khusus yang dipercaya oleh masyarakat desa/kelurahan untuk mendeteksi kemungkinan ancaman bencana?

N: Ada mas, terutama yang lewat KSM tadi ada pos pemantauan di sebelah Utara sana, ada alat komunikasi, pemantauan sinyal, jadi untuk KSM itu ada jadwal jaganya disana.

P: Apakah kelompok atau individu tersebut dalam menjalankan tugasnya dilegalkan oleh pemerintah desa/kelurahan?

N: Iya legal mas.

Indikator 20. Tersedianya Mekanisme Penerima Peringatan Dini Dan/Atau Perintah Evakuasi

P: Apakah masyarakat dapat menerima peringatan dini ancaman bencana yang diberikan oleh pemerintah pusat?

N: Dapat mas.

P: Apakah masyarakat dapat menerima peringatan tersebut melalui lebih dari 2 peralatan komunikasi yang berbeda?

N: Biasanya itu lewat media WA. Lalu lewat frekuensi HT mas, 2 itu yang kita gunakan.

Indikator 21. Berfungsinya Mekanisme Penyebaran Arahan Evakuasi Yang Mudah Diakses Dan Dipahami Semua Pihak Termasuk Kelompok Rentan

P: Apakah ada mekanisme penyebaran informasi/arahan untuk mengungsi sebelum bencana terjadi yang dilakukan khusus oleh pemerintah desa?

N: Ada mas, itu kita tergantung *fasenya* mas, kemarin misalnya kita posisi siaga harus segera evakuasi untuk kelompok rentan, dan tempat-tempatnya pun sudah ditetapkan sesuai kesepakatan kontingensi. Tempat evakuasi nya di Gedung sini mas, dan juga ada di barak.

P: Apakah dari kami bisa mengecek rencana kontingensi nya mas?

N: Bisa dilihat lewat dokumen disini mas, karena kalau di web tidak ada.

P: Draftnya ini baru ya Pak?

N: Itu baru disahkan 2020 mas, pertengahan 2020 ketika ada Covid itu kita perbarui. Ini yang sebelum Covid.

P: Apakah Peringatan ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat desa/kelurahan?

N: Iya.

P: Apakah masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menerima peringatan/arahan ini?

N: Sebenarnya warga mampu dan sudah tahu mas, tapi kalau evakuasi itu ada beberapa yang menunggu instruksi dulu. Contohnya kalau siaga itu ada kesepakatan harus evakuasi, tapi tetap menunggu instruksi terutama dari Kadusnya mas.

Indikator 22. Tersedianya Peta Rencana Evakuasi Masyarakat Yang Dapat Digunakan Sebelum Dan Pada Saat Bencana Terjadi

P: Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia peta rencana evakuasi untuk masyarakat?

N: Kalau petanya belum ada, baru sebatas yang dicatat dalam bentuk tulisan.

Indikator 23. Tempat Evakuasi

P: Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia tempat evakuasi sementara dengan kapasitas yang memadai untuk masyarakat berisiko?

N: Iya ada mas, di Gedung sini, di barak Gayam di Argomulyo dan barak Koripan di Sindumartani.

P: Adakah tempat evakuasi sementara ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/ kelurahan?

N: Untuk Gedung pertemuan itu lewat desa, tapi barak-barak itu cenderung dari BPBD. Tapi pengelolaannya memang dari desa setempat, dan ada dari relawan disana, itu sudah diserahkan.

Indikator 24. Jalur Dan Rambu Evakuasi

P: Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke tempat evakuasi masyarakat?

N: Jalur ada mas, 2 jalur. 1 di Jl. Poros Desa dan di Jl. Perbatasan dengan Jawa Tengah.

P: Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia rambu evakuasi yang mengarah ke tempat evakuasi masyarakat?

N: Ada mas, terutama di dusun-dusun ada petunjuk arah, jalur evakuasi, petunjuk titik kumpul juga ada.

P: Apakah jalur evakuasi ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan?

N: Iya mas, mungkin untuk perawatannya.

P: Apakah rambu evakuasi ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan?

N: Iya.

P: Apakah jalur evakuasi yang tersedia, dapat digunakan desa/kelurahan tetangga?

N: Kalau tetangga biasanya sudah punya sendiri mas, apalagi sinikan sudah paling utara mas, jadi dari atasnya sudah tidak ada.

Indikator 25. Adanya Latihan Kesiapsiagaan Bencana Secara Berkala Dan Berkelanjutan Tingkat Desa/Kelurahan

P: Adakah latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana (simulasi) yang dilakukan oleh masyarakat di desa/kelurahan?

N: Dulu pernah ada, tapi secara rutin belum ada mas, hanya pernah diadakan.

P: Apakah seluruh komponen masyarakat (masyarakat umum, pemerintahan, swasta, sekolah dll) terlibat dan berpartisipasi aktif dalam latihan (simulasi) ini?

N: Iya ikut mas, dari masyarakat, relawan, pemerintah ikut semua.

P: Apakah desa/kelurahan melakukan latihan (simulasi) bersama dengan desa/kelurahan tetangga dalam kawasan rawan bencana?

N: Kalau itu belum mas.

Indikator 26. Tersedianya Relawan Penanggulangan Bencana Desa Atau Kelurahan Yang Memiliki Kemampuan Dalam Melakukan Penanganan Darurat Bencana

P: Apakah desa/kelurahan memiliki relawan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat saat terjadinya bencana?

N: Iya mas, KSM itu.

P: Apakah para relawan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pertolongan pertama saat terjadi bencana?

N: Iya mas, karena sudah ada pelatihan dari BPBD.

P: Apakah para relawan berlatih secara periodik untuk meningkatkan keterampilannya?

N: Tidak mas.

P: Apakah para relawan didukung dengan peralatan yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing?

N: Ada mas, misalnya alat komunikasi, ambulans juga ada, kemudian gergaji mesin dan alat-alat lain ada juga.

P: Apakah relawan tersebut didukung oleh pemerintah desa/kelurahan untuk aktivitasnya?

N: Iya pasti mas, karena untuk pengadaan juga lewat desa.

Komponen 5 Kesiapsiagaan Pemulihan

Indikator 27. Tersedianya Berbagai Mekanisme Yang Ditujukan Untuk Upaya Pemulihan Dini Bencana Di Tingkat Desa/Kelurahan

P: Apakah sudah ada mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri?

N: Mekanisme penilaian itu dari BPBD mas.

P: Apakah ada mekanisme pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan fungsi?

N: Kalau bantuan ada mas, misalnya kemarin saat pengungsian itu pengelolaan bantuannya dari UnitLak, pengelolaan di bawah desa. Jadi semua bantuan yang masuk itu lewat UnitLak.

Indikator 28. Tersedianya Perencanaan Pemulihan Berkelanjutan Untuk Berbagai Aset Dan Properti Strategis Yang Berisiko Tinggi Rusak Terkena Bencana

P: Apakah ada mekanisme penilaian secara mandiri fasilitas yang berada di lokasi paling berisiko tinggi?

N: Ada mas, tempat wisata itu juga berisiko, karena kan paling ujung mas, Bukit Klamong itu misalnya. Selain itu ada Teras Merapi juga.

P: Apakah sebelumnya pernah ada fasilitas yang hancur, kemudian dibangun kembali di daerah lebih aman?

N: Kalau dipindah itu pemukiman ada mas, Huntap (Hunian Tetap) itu misalnya mas, yang lain tidak ada. Huntap itu milik dusun Singlar, Glagah Malam, Ngancang(?), sama Besalen mas.

P: Selain Huntap, apakah ada fasilitas lain terkait kebencanaan Pak?

N: Ada EWS mas. Ada pos relawan juga.

P: Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak.

N: Sama-sama mas.

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Wawancara Kepala BPBD Sleman



Wawancara Kecamatan Cangkringan



Wawancara Carik Desa Glagahario



Wawancara Kepala Dusun Srunen



Wawancara Kepala Dusun Kalitengah Lor



Wawancara Ahli/Peneliti



Huntap Jetis Sumur



Huntap Gadina



Huntap Baniarsari



Balai Desa Glagahario



Pos Jaga Relawan KSM



Posko PPKM Mikro Covid-19



Posko Pemantauan Utama Relawan KSM



Sarpras Ambulan KSM



Barak Penunasi Desa Glaahario



Barak Ternak Desa Glaahario



Pos Pemantauan Gunung Merapi



SD dengan Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan *Sister School*



TK dan Paud di Desa Glaahario



Puskesmas di Desa Glaahario



Jalan Poros Desa



Pos Pemantauan di Bukit Klanqon



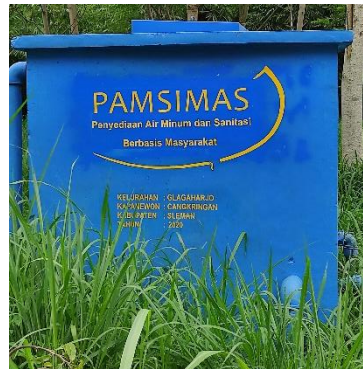
Rambu Peringatan dan Jalur Evakuasi



Sarana Prasarana *Early Warning System* (EWS) Desa Glagaharjo



Tempat nametaq baqi perumput



Sarana Prasarana Pamsimas

Lampiran 4. Surat Perizinan Penelitian dari Kecamatan Cangkringan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON CANGKRINGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦕꦁꦏꦿꦶꦁꦤ꧀

Jalan Pakem-Cangkringan, Panggung Argomulyo Cangkringan Sleman 55583

Telepon (0274) 4469550, Faksimile (0274) 4469550

Website: cangkringankec.slemankab.go.id E-mail: cangkringankec@slemankab.go.id

Cangkringan, 2 November 2021

Nomor : 070/12
hal : Rekomendasi Penelitian
Kepada
Yth Lurah Glagaharjo
Kapanewon Cangkringan
di Cangkringan

Memperhatikan Surat permohonan Ijin dari :

Nama : Dr. Syamsunasir, S.Sos., MM., C.Fr.A
Jabatan : Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI.
Nomor : -
Tanggal : 21 Oktober 2021

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, dengan ini Pemerintah Kapanewon Cangkringan dapat memberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul " **Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah di Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman** " kepada :

Nama : LEXI JALU AJI
NIM/NIP : 120200301014
Jabatan : Mahasiswa Program Study Manajemen Bencana Fakultas
Keamanan Nasional Unhan RI

Alamat Universitas : Jl. Salemba Raya No. 14 Jakarta
No. Telp/HP : (021) 29618766
Lokasi penelitian : Kalurahan Glagaharjo
Waktu : 2 November s/d 15 Desember 2021

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tat tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian rekomendasi ini i dikeluarkan aga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Panewu Cangkringan,

Djaka Sumarsono, AP, M.Si
Pembina, IV/a

NIP 19741111 199412 1 001

Lampiran 5. Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Merapi Desa Glagaharjo

2020



redr
indonesia

unicef
for every child

Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunungapi Merapi



DESA GLAGAHARJO

KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lampiran 6. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Glagaharjo

